
Analisis Pendapatan, Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Usaha Peternakan Sapi Perah Rakyat di Kabupaten Pelalawan

Hendri

Fakultas Pertanian Universitas Riau

hendri75.h7@gmail.com

Abstract

The development of dairy cows in Pelalawan District is integrated with plantation crops (cow-oil). Riau Province has the largest oil palm plantation in Indonesia, which is 2.706 million hectares, so it has a potential source of feed for dairy cattle and is expected to have an impact on the competitiveness of cattle farming in Riau. The research was conducted on the people's dairy farming business in Pelalawan Regency, with the aim of knowing the level of profit, competitiveness and impact of government policies on dairy farming using the Policy Analysis Matrix (PAM). The results showed that the average private breeders' profit was Rp. 19,481,081.55/head/lactation and social benefits of Rp. 20,431,492.21/head/lactation. Smallholder dairy farming in Pelalawan Regency has good competitive competitiveness (PCR=0.25) and comparative competitiveness (DRCR=0.24). Dairy farmers receive input subsidies from the government with an NPCI of 0.79 and are also burdened with an output tax with an NPCO of 0.93. Overall, government policies have not provided incentives (disincentives) for dairy farming in Pelalawan District with an EPC of 0.96.

Keywords : profit, competitiveness, policy impact, dairy cows

Pendahuluan

Pembangunan peternakan diarahkan untuk meningkatkan mutu hasil produksi, meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja meningkatkan gizi masyarakat serta memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat pedesaan. Dalam rangka memenuhi gizi masyarakat yang bersumber dari protein hewani, maka prioritas kebijakan pembangunan peternakan diarahkan kepada komoditas usaha peternakan yang memiliki keunggulan berdaya saing dipasar global. Komoditas usaha peternakan dengan performans keunggulan produksi lebih dari komoditas usaha peternakan lainnya adalah usaha peternakan sapi perah. Sapi perah memiliki keunggulan disamping menghasilkan daging juga memproduksi susu. Susu merupakan produksi utama yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Usaha agribisnis terhadap komoditas ini telah memberikan keuntungan bagi pelakunya. Susu juga merupakan salah satu jenis produk peternakan yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia.

Usaha peternakan sapi perah di Indonesia didominasi oleh usaha peternakan rakyat (90%). Usaha peternakan rakyat dengan kepemilikan dibawah 10 ekor (Astuti, *et al.*, 2010). Populasi sapi perah sebesar 98% berada di pulau jawa, 2% di luar pulau jawa, begitu juga pengolahan susu (IPS) nasional seluruhnya di pulau Jawa. Kondisi ini membuat produksi susu

nasional sulit berkembang. Daerah luar jawa, memiliki potensi untuk pengembangan usaha peternakan sapi perah. Hal ini didukung oleh ketersediaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang cukup memadai belum dimanfaatkan secara optimal. Perlu dukungan pemerintah melalui kebijakan dan regulasi di subsektor peternakan guna meningkatnya jumlah populasi ternak perah rakyat, sehingga meningkatnya jumlah produksi susu nasional. Salah satu kebijakan pemerintah melalui Permentan No.105/Permentan/PD.300/8/2014, dapat dijadikan sebagai landasan mendukung pengembangan integrasi sapi-sawit di daerah. Implikasi kebijakan ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan atau pelaku usaha budidaya ternak sapi dalam melakukan integrasi sapi-sawit.

Provinsi Riau memiliki kebun kelapa sawit terluas di Indonesia, yakni 2,706 juta hektar (Ditjen Perkebunan, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Riau memiliki daya saing komparatif dari segi potensi lahan dan ketersediaan hijauan pakan ternak, sehingga prospek untuk pengembangan peternakan kedepannya, khususnya budidaya sapi perah. Sapi perah merupakan ternak ruminansia besar yang mempunyai performans produksi yang baik, memiliki produk utama dan hasil ikutan maupun turunan yang bernilai tambah serta

memiliki kemampuan berdaya saing dari segi ekonomi usaha.

Populasi sapi perah dan produksi susu segar di Provinsi Riau, terbanyak di Kabupaten Pelalawan. Pola pemeliharaan sapi perah di Kabupaten Pelalawan terintegrasi dengan tanaman perkebunan (sapi-sawit), diharapkan dengan adanya naungan kelapa sawit dapat memberikan kenyamanan dan kesejukan bagi ternak perah yang pada umumnya dipelihara di dataran tinggi, serta dengan pendekatan kemanfaatan, keterpaduan dan keberlanjutan terutama pemanfaatan produk sampingan kelapa sawit (bungkil inti sawit daun pelepah sawit) yang dapat dijadikan sumber pakan ternak serta hasil ikutan ternak berupa kotoran yang dapat dijadikan sebagai pupuk organik padat dan urine sebagai pupuk organik cair.

Kendala yang dihadapi oleh peternak sapi perah di Kabupaten Pelalawan, antara lain kepemilikan ternak berskala kecil, kualitas SDM peternak, permasalahan teknis seperti memperoleh bibit sapi perah dengan genetis yang unggul, tingginya harga pakan konsentrat, terbatasnya kesediaan obat-obatan ternak serta keterbatasan modal untuk pengembangan usaha. Kepemilikan ternak yang sedikit dengan skala usaha kecil, berdampak pada jumlah susu yang dihasilkan. Dengan sedikitnya produksi susu

yang dihasilkan mengakibatkan belum optimalnya pendapatan yang diperoleh oleh peternak rakyat. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat tingkat keuntungan, daya saing dan dampak kebijakan pemerintah pada usaha peternakan sapi perah rakyat di Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan analisis matriks PAM (*Policy Analysis Matrix*)

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada kelompok usahaternak sapi perah di Kabupaten Pelalawan, yakni pada Kelompok Ternak Makmur Bersatu desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kelompok Ternak Karya Lestari Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan. Data berasal dari 17 responden peternak yang memiliki sapi perah masih laktasi, dengan rincian 5 reponden peternak yang tergabung dalam kelompok Ternak Sapi Makmur dan 12 peternak pada Kelompok Ternak Karya Lestari. Untuk menganalisis daya saing dan dampak kebijakan usaha ternak sapi perah digunakan *Policy Analisis Matrik (PAM)*, menurut Monke dan Person (1989)

Tabel 1. Matriks Analisis Kebijakan (PAM)

Komponen	Penerimaan	Biaya Faktor Produksi		Keuntungan
		<i>Tradable</i>	<i>Non-tradable</i>	
Harga privat	A	B	C	D
Harga sosial	E	F	G	H
Divergensi	$I = A - E$	$J = B - F$	$K = C - G$	$L = D - H$

Sumber : Monke dan Pearson (1989)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Matriks Kebijakan (*Policy Analysis Matrix*) dapat diperoleh berbagai informasi dan gambaran tentang

tingkat keuntungan, daya saing dan dampak kebijakan pemerintah terhadap usaha peternakan sapi perah rakyat di Kabupaten Pelalawan. Hasil analisis matriks PAM dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Matriks Analisis Kebijakan (PAM) Usaha Peternakan Sapi Perah Rakyat di Kabupaten Pelalawan

Komponen	Penerimaan (Rp/ekor/laktasi)	Biaya Input Produksi		Keuntungan (Rp/ekor/laktasi)
		Tradable (Rp/ekor/laktasi)	Non-tradable (Rp/ekor/laktasi)	
Harga privat	29.806.301,37	3.902.822,86	6.422.396,97	19.481.081,55
Harga sosial	31.986.909,42	4.937.438,20	6.617.979,01	20.431.492,21
Divergensi/Transfer	(2.180.608,05)	(1.034.615,34)	(195.582,05)	(950.410,66)

Sumber : Data olahan penelitian, 2020
PAM, Monke dan Pearson (1989)

Indikator :

Keuntungan Privat(D) = (A)-(B)-(C)
: 19.481.081,55

Keuntungan Sosial(H) = (E)-(F)-(G)
: 20.431.492,21

Rasio biaya privat(PCR) = C/(A - B)
: 0,25

Rasio biaya sumberdaya domestik(DRCR) = G/(E-F) : 0,24

Transfer Output(I) = (A)-(E)
: (2.180.608,05)

Koefisien proteksi output nominal(NPCO) = A/E
: 0,93

Transfer Input(J) = (B)-(F)
: (1.034.615,34)

Koefisien proteksi input nominal(NPCI) = B/F
: 0,79

Transfer Faktor(K) = (C)-(G)
: (195.582,05)

Transfer Bersih(L) = (D)-(H)
: (950.410,66)

Koefisien proteksi efektif(EPC) = (A-B)/(E-F)
: 0,96

Koefisien keuntungan(PC) = D/H
: 0,95

Koef. Subsidi Rasio untuk Produsen(SRP) = L/E : -0,03

Berdasarkan Tabel 2, selanjutnya dapat dianalisis dengan berbagai indikator keuntungan (keuntungan privat, keuntungan sosial). Indikator daya saing (keunggulan kompetitif dan komparatif) serta indikator dampak kebijakan pemerintah (kebijakan input, kebijakan output dan kebijakan input-output).

Keuntungan Privat (Finansial)

Keuntungan Privat (KP) menunjukkan selisih antara penerimaan dengan biaya yang sesungguhnya diterima atau dibayarkan petani/peternak. Berdasarkan pada Tabel 2,

diperoleh Nilai KP sebesar Rp. 19.481.081,55/ekor/laktasi, bernilai lebih besar dari nol atau bernilai positif, berarti usaha peternakan sapi perah rakyat di Kabupaten Pelalawan secara finansial menguntungkan pada kondisi adanya kebijakan pemerintah atau komoditi menguntungkan untuk diusahakan. Jika nilai KP kurang dari atau sama dengan nol maka yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu kegiatan usaha tidak menguntungkan pada kondisi adanya kebijakan pemerintah.

Keuntungan Sosial (Ekonomi)

Keuntungan Sosial (KS) menunjukkan besarnya penerimaan yang diterima oleh para peternak setelah membayar seluruh biaya input produksi pada kondisi pasar persaingan sempurna, dimana tidak ada campur tangan pemerintah. Hasil olahan Matrik PAM pada Tabel 2, diperoleh Nilai KS sebesar Rp 20.431.492,21/ekor/laktasi, bernilai positif atau lebih besar dari nol, berarti usaha ternak sapi perah rakyat di Kabupaten Pelalawan, memberikan keuntungan secara ekonomi dengan kondisi tanpa adanya campur tangan dari pemerintah.

Nilai Keuntungan Sosial (KS) dalam usaha ternak sapi perah di Kabupaten Pelalawan memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai Keuntungan Privat (KP). Hal ini dikarenakan harga sosial dari output produksi berupa susu segar nilainya lebih tinggi yaitu Rp. 8.473,23 per liter susu dibandingkan dengan harga privatnya yaitu sekitar Rp. 8.000 per liter susu. Artinya usaha sapi perah lebih menguntungkan saat tidak ada intervensi dari pemerintah baik terhadap input ataupun output. Kebijakan pemerintah yang diterapkan saat ini seperti kebijakan harga impor (tarif impor) belum dapat mengoptimalkan keuntungan yang

diterima oleh peternak dalam hal pengusahaan ternak sapi perah.

Keunggulan Kompetitif

Analisis keunggulan kompetitif dari suatu komoditas ditentukan oleh nilai Rasio Biaya Privat (PCR). PCR merupakan rasio antara biaya input *non tradable* dengan nilai tambah atau selisih antara penerimaan dan input *tradable* pada tingkat harga privat. Nilai PCR dapat menunjukkan bagaimana alokasi sumberdaya diarahkan untuk mencapai efisiensi finansial dalam memproduksi susu sapi segar. Apabila nilai PCR yang diperoleh lebih kecil dari (<1) maka suatu aktifitas dapat dikatakan berdaya saing atau efisiensi secara finansial pada saat adanya kebijakan pemerintah. Semakin kecil nilai PCR maka semakin tinggi tingkat keunggulan kompetitif yang dimiliki suatu komoditas usaha.

Hasil Analisis Matriks Kebijakan menunjukkan bahwa nilai PCR pada usaha ternak sapi perah rakyat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau adalah sebesar 0,25. Nilai tersebut menunjukkan bahwa usaha ternak sapi perah di Kabupaten Pelalawan memiliki daya saing secara kompetitif dan efisiensi secara finansial (privat). Nilai PCR 0,25 artinya bahwa untuk mendapatkan nilai tambah output sebesar satu satuan pada harga privat pada usaha ternak sapi perah diperlukan tambahan biaya faktor domestik sebesar 0.25 satuan.

Keunggulan Komparatif

Keunggulan komparatif adalah indikator untuk menilai apakah komoditi susu segar yang diusahakan di Kabupaten Pelalawan memiliki daya saing (keunggulan komparatif), mampu bertahan tanpa adanya bantuan dari pemerintah, dan memiliki peluang yang besar sebagai produk substitusi impor. Analisis keunggulan komparatif dari suatu komoditas ditentukan oleh Rasio Biaya Sumberdaya Domestik atau *Domestic Resource Cost Ratio* (DRCR). Suatu usaha dikatakan efisien secara ekonomi atau berdaya saing secara komparatif apabila memiliki nilai DRCR yang kurang dari satu (<1). Hasil Analisis Matriks Kebijakan (PAM) pada usaha ternak sapi perah rakyat di Kabupaten Pelalawan diperoleh nilai DRCR sebesar 0,24. Nilai DRCR <1 , menunjukkan bahwa usaha ternak sapi perah di Kabupaten Pelalawan efisiensi secara ekonomi dan mempunyai keunggulan komparatif serta

mampu berjalan tanpa adanya intervensi dari pemerintah.

Berdasarkan analisis PAM, nilai DRCR yang kurang dari satu dapat dijelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan domestik akan komoditi susu segar lebih baik diproduksi dalam negeri karena biaya produksi susu segar dalam negeri relatif murah dibandingkan dengan mengimpor susu bubuk dari luar negeri dengan biaya yang jauh lebih tinggi. Akan tetapi pada kenyataannya produksi susu dalam negeri hanya dapat memenuhi 21 persen dari total kebutuhan susu nasional dan sisanya impor 79% (Pusdatin Kementan RI). Oleh karena itu perlu adanya intervensi dan dukungan pemerintah untuk meningkatkan pengembangan ternak perah di luar pulau Jawa, agar perkembangan dan pertumbuhan ternak sapi perah tidak stagnan. Penyebaran ternak di luar pulau Jawa akan dapat meningkatkan produktivitas susu nasional. Disamping kebijakan pengembangan ternak, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas usaha peternak beskala kecil dengan membantu modal usaha melalui fasilitasi pembiayaan berupa kredit program bersubsidi kepada peternak dengan bunga yang rendah serta memperkuat strukturisasi persusuan melalui penguatan kelembagaan poknak/gapoknak dan koperasi susu di daerah dan perbaikan sistem hulu hingga hilir dari agribisnis persusuan nasional.

Nilai DRCR yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai PCR ($DRCR < PCR$) menunjukkan bahwa belum optimalnya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi peternak dalam memproduksi susu segar. Penurunan efisiensi produksi terjadi ketika pemerintah menghapus subsidi untuk pakan ternak dan obat-obatan pada tahun 2000, disamping harga pakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini juga menjadi salah satu dampak semakin menurunnya efisiensi produksi susu usaha ternak sapi perah rakyat.

Analisis Dampak Kebijakan

Indikator dampak kebijakan pemerintah terhadap usaha peternakan sapi perah rakyat di Kabupaten Pelalawan, meliputi kebijakan input (TI, NPCI, dan TF), kebijakan output (TO dan NPCO) dan kebijakan input output (TB, EPC, PC, dan SRP). dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel. 3 Indikator Dampak Kebijakan

Indikator Dampak Kebijakan	Nilai
Dampak Kebijakan Input	
-Transfer Input (TI)	-1.034.615,34
-NPCI	0,79
-Faktor Transfer (FT)	-195.582,05
Dampak Kebijakan Output	
-Transfer Output (TO)	-2.180.606,05
-NPCO	0,93
Dampak Kebijakan Input-Output	
-Transfer Bersih (TB)	-950.410,66
-EPC	0,96
-PC	0,95
-SRP	-0,03

Sumber : Data olahan penelitian, 2020

Dampak Kebijakan Input

Nilai Transfer Input (TI) merupakan selisih dari harga privat input *tradable* dengan harga sosialnya. Transfer Input (TI) yang bernilai positif menjelaskan bahwa adanya kebijakan subsidi negatif atau pajak pada unsur input *tradable* yang akan mengurangi tingkat keuntungan produsen atau dengan kata lain produsen tidak mendapatkan insentif dari kebijakan tersebut. Sebaliknya, jika Transfer Input (TI) bernilai negatif menunjukkan adanya kebijakan subsidi pada input akan mengakibatkan biaya yang dikeluarkan untuk input pada tingkat harga privat menjadi lebih rendah dibandingkan pada tingkat harga sosialnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pada input *tradable* akan menguntungkan produsen lokal. Dalam penelitian ini, berdasarkan Tabel 3, dari hasil Matriks Analisis Kebijakan (PAM) diperoleh nilai Transfer Input (TI) negatif sebesar -Rp 1.034.615,34/ekor/laktasi. TI yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa peternak sapi perah di Kabupaten Pelalawan, secara finansial (privat) menguntungkan. Keuntungan ini diperoleh karena harga privat lebih rendah dari harga sosial pada perolehan input *tradable* pada tingkatan harga pakan konsentrat. Peternak sapi perah di Kabupaten Pelalawan membuat pakan konsentrat sendiri dengan memanfaatkan potensi bahan pakan konvensional (lokal), seperti dedak, jagung, bungkil kelapa sawit dan bahan lainnya.

Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI) merupakan rasio untuk mengukur

transfer input *tradable*. NPCI menunjukkan seberapa besar perbedaan harga domestik dari *input tradable* dengan harga sosialnya. Nilai NPCI menunjukkan tingkat proteksi atau distorsi yang dibebankan pemerintah pada input *tradable* bila dibandingkan tanpa adanya kebijakan. Berdasarkan hasil analisis, nilai NPCI diperoleh sebesar 0,79. NPCI yang bernilai negatif (NPCI < 1) tersebut menjelaskan bahwa biaya input domestik lebih rendah dibandingkan dengan biaya input pada tingkat harga dunia. Hal ini dikarenakan peternak sapi perah di Kabupaten Pelalawan menggunakan bahan baku input dalam negeri dalam pembuatan pakan konsentrat. Nilai NPCI 0,79 mengandung arti bahwa peternak diuntungkan sebesar 21% dikarenakan menggunakan bahan konvensional bila dibandingkan dengan produk sejenis berupa pakan konsentrat impor atau ada daya saing input bahan lokal yang memberikan keuntungan kepada peternak sapi perah di Kabupaten Pelalawan

Nilai TF menunjukkan besarnya subsidi terhadap input *non tradable*. Berdasarkan hasil Analisis Matriks Kebijakan (PAM) diperoleh nilai Transfer Faktor (TF) pada input *non tradable* negatif sebesar -Rp 195.582,05/ekor/laktasi. Nilai TF negatif, menunjukkan bahwa adanya kebijakan subsidi oleh pemerintah terhadap pemakaian input *non tradable* yang digunakan oleh produsen (peternak sapi perah). Dalam penelitian ini, adanya transfer pemerintah terhadap peternak sapi perah dalam penggunaan input *non tradable* berupa subsidi harga dasar listrik kepada peternak pada daya 450 VA.

Dampak Kebijakan Output

Transfer output terjadi karena adanya divergensi pada harga output yang disebabkan karena adanya perbedaan antara harga privat dengan harga sosialnya. Nilai TO positif menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pada output menyebabkan harga out privat lebih besar dibandingkan dengan harga output pada harga bayangan (sosial). Hal ini menunjukkan adanya insentif dari konsumen kepada produsen dimana konsumen membayar harga lebih tinggi dari harga yang seharusnya dibayarkan. Nilai TO negatif berarti menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah melalui distorsi pasar menyebabkan harga privat output menjadi lebih rendah dibandingkan dengan harga sosial outputnya.

Hasil analisis pada tabel PAM, diperoleh nilai Transfer Output (TO) adalah negatif pada usaha ternak sapi perah rakyat di Kabupaten Pelalawan yakni -Rp. 2.180.608,05/ekor/laktasi. Nilai TO yang negatif menunjukkan adanya divergensi dimana harga privat output susu segar yang dihasilkan oleh peternak sapi perah rakyat di Kabupaten Pelalawan lebih rendah dibandingkan dari harga sosialnya. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa adanya kebijakan pemerintah terhadap output susu lebih menguntungkan konsumen dibanding produsen (peternak), karena konsumen membeli susu segar dengan harga yang lebih rendah dari harga yang seharusnya. Konsumen mendapat transfer output sebesar Rp. 2.180.608,05/ekor/laktasi, sehingga konsumen dapat membeli susu segar dengan harga yang lebih rendah dari peternak domestik.

Kebijakan pemerintah berupa penetapan tarif impor sebesar lima persen (5%), belum berjalan efektif karena pada kenyataannya produsen susu dalam negeri (peternak domestik) masih sulit bersaing dengan susu impor. Tarif impor sebesar lima persen masih dirasa rendah oleh para peternak karena belum dapat meningkatkan efisiensi usaha mereka. Divergensi untuk penerimaan output yang bernilai negatif ini terjadi karena harga sosial susu diperhitungkan berdasarkan harga susu impor yang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga susu dalam negeri dengan standar kualitas yang sama.

Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO) digunakan untuk mengukur output transfer, dimana besarnya nilai NPCO adalah dari hasil perbandingan penerimaan privat

dengan penerimaan sosial. Nilai NPCO menunjukkan seberapa besar harga output domestik (harga privat) berbeda dengan harga sosial (person et al, 2005). Berdasarkan hasil analisis, nilai NPCO yang didapatkan pada penelitian ini adalah sebesar 0.93 atau kurang dari satu, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah menetapkan tarif impor lima persen (5%) belum berjalan efektif karena menyebabkan harga yang diterima oleh peternak lebih rendah dari harga sosialnya. Produsen hanya menerima harga output susu 93 persen atau kehilangan penerimaan (*revenue*) sebesar 7 persen dari harga yang seharusnya diterima peternak bila tidak adanya distorsi pasar dan intervensi pemerintah pada pasar output.

Dampak Kebijakan Input-output

Nilai Transfer Bersih (TB) menunjukkan selisih antara Keuntungan Privat (KP) dengan Keuntungan Sosial (KS). Berdasarkan indikator hasil analisis PAM pada Tabel 3, nilai Transfer Bersih (TB) bernilai negatif yakni -Rp. 1.291.149,36/ekor/laktasi. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pengurangan surplus produsen sebesar nilai TB yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat ini. Keuntungan yang diperoleh produsen pada kondisi adanya kebijakan pemerintah dan distorsi pasar pada saat ini berkurang Rp. 1.291.149,36/ekor/laktasi dibandingkan kerugian apabila tidak ada intervensi pemerintah.

Koefisien Proteksi Efektif (EPC) merupakan indikator dari dampak keseluruhan kebijakan input dan output terhadap sistem produksi usaha dalam hal ini adalah usaha ternak sapi perah rakyat di Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan hasil analisis, nilai EPC yang didapatkan dalam penelitian ini adalah 0,96. Nilai EPC yang kurang dari satu menunjukkan bahwa kebijakan input-output belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan harga privat output yang diterima peternak lebih rendah dibandingkan dengan harga sosialnya serta beberapa harga input *tradable* yang diterima peternak juga lebih mahal dari harganya bayangannya.

Dampak dari seluruh transfer atas keuntungan privat dapat diukur dengan *Profitabilitas Coefficient* (PC). PC sama dengan rasio antara keuntungan privat dan keuntungan sosial. Tabel 3, menunjukkan nilai PC sebesar 0,95 berarti bahwa keuntungan produsen

dengan intervensi dan distorsi yang terjadi saat ini adalah 95% dari keuntungan yang seharusnya (keuntungan sosial). Nilai PC tersebut juga menunjukkan bahwa produsen (peternak) kehilangan keuntungan (pendapatan) sebesar 5 % dari hasil produksi.

Rasio subsidi bagi produsen (SRP) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seluruh dampak transfer yang merupakan perbandingan antara transfer bersih dengan nilai output pada tingkat harga dunia. SRP juga dapat menunjukkan pengaruh transfer terhadap perubahan pendapatan dari suatu sistem. Nilai SRP yang negatif ($SRP < 0$) berarti terjadi besarnya pengeluaran produsen pada biaya produksi lebih besar dibandingkan biaya imbangannya akibat adanya kebijakan pemerintah tersebut. Nilai SRP yang positif ($SRP > 0$) menunjukkan bahwa adanya kebijakan pemerintah menyebabkan produsen mengeluarkan biaya produksi terhadap input lebih rendah dari biaya imbalan untuk berproduksi.

Berdasarkan indikator hasil olahan matrik PAM pada Tabel 3, diperoleh nilai SRP negatif sebesar -0,03, menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini menyebabkan produsen susu mengeluarkan biaya produksi lebih besar 3 persen dari biaya yang dikeluarkan setiap periode produksi. Nilai SRP yang negatif juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah secara umum melalui distorsi pasar yang terjadi saat ini belum menguntungkan produsen atau dalam hal ini peternak sapi perah rakyat di Kabupaten Pelalawan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang diuraikan pada hasil dan pembahasan, maka kesimpulan yang ditarik adalah ;

1. Usaha peternakan sapi perah rakyat di Kabupaten Pelalawan menguntungkan secara finansial (privat) dan ekonomi (sosial) usaha. Nilai keuntungan privat lebih kecil dibandingkan dengan nilai keuntungan di tingkat sosial. Hal ini disebabkan karena harga bayangan (sosial) susu impor lebih tinggi dari harga privat atau finansialnya.
2. Usaha peternakan sapi perah rakyat di Kabupaten Pelalawan memiliki keunggulan daya saing komoditas, baik keunggulan kompetitif ($PCR=0,25$) maupun keunggulan daya saing komparatif ($DRCR=0,24$).

Keunggulan ini didukung oleh faktor input produksi domestik berupa pemanfaatan potensi limbah sawit (pelepah daun sawit dan bungkil inti sawit). Pelepah daun sawit sebagai substitusi pakan hijauan segar dan bungkil inti sawit yang dijadikan bahan penyusun pakan konsentrat, sehingga dengan keunggulan lokal ini dapat menekan biaya produksi dari penggunaan pakan. Hampir 70% dari biaya produksi pada penelitian ini bersumber dari pemberian pakan.

3. Peternak sapi perah di Kabupaten Pelalawan mendapat subsidi input dari pemerintah dengan NPCI sebesar 0,79 dan juga dibebani pajak output dengan NPCO sebesar 0,93. Secara keseluruhan kebijakan pemerintah belum memberikan insentif (disinsentif) terhadap usaha ternak sapi perah di Kabupaten Pelalawan dengan EPC sebesar 0,96.

Daftar Pustaka

- Astuti, M, Rini W dan Yustina YS. 2010 *Efisiensi Produksi Usaha Sapi Perah Rakyat (Studi kasus pada peternak anggota koperasi usaha peternakan dan pemerahan sapi perah Kaliurang, Sleman, Yogyakarta*. Buletin Peternakan Vol34 (1) : 64-69.
- Daniel, M. 2002. *Pengantar Ekonomi Pertanian Untuk Perencanaan*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 2020. *Statistik Peternakan Tahun 2019*, Pekanbaru
- Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan. 2020. *Peternakan Dalam Angka Tahun 2019*, Pangkalan Kerinci
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2019. *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan*, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2019. *Statistik Perkebunan Indonesia 2018-2020*, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta

-
- Esmay, M.L.1982. *Principle of Animal Environmental.Connecticut* : AVI Publishing Company, Inc.
- Farhan, N dan Fitriani, A. 2009. *Daya Saing Usaha ternak Sapi Rakyat Pada Kelompok Tani dan Non Kelompok Tani di Kelurahan Eka Jaya*. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora. Volume 11 (2) : hlm 9-16.
- Hutagaol, M.P. dan Feryanto, W.K. 2011. *Analisis Daya Saing Susu Murni Produksi Koperasi dan Formulasi Kebijakan Peningkatan Daya Saingnya di Pasar dalam Negeri (Studi Kasus pada Koperasi Susu di Provinsi Jawa Barat)*, Jurnal Ekonomi. Volume 29 (2)
- Monke, E. A. dan S. R. Pearson. 1989. *The Policy analysis Matrix for agricultural Development*. Cornel University Press. Ithaca.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Nomor 101/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Susu Tertentu.
- Peraturan Menteri Pertanian No.49/Permentan/PD.300./9/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budidaya Sapi Potong.
- Sudono, A. 1999. *Ilmu Produksi Ternak Perah*. Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Tarsono. 2006. *Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Daya Saing Gula (Kasus di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat)*. Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumber Daya, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Bogor.